

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencapaian peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu bangsa disebut juga dengan perkembangan ekonomi. Masyarakat bekerja guna memperoleh pendapatan sebagai pemenuh kebutuhan, oleh sebab itu banyak bentuk usaha atau sektor usaha yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka, diantaranya yaitu sektor pertanian, industri dan lain sebagainya. Meskipun begitu dalam kegiatan tersebut permodalan memberikan hambatan untuk mengembangkan usaha mereka.

Sektor pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS tahun 2017 sektor pertanian berkontribusi sekitar 13,53% terhadap ekonomi nasional, dengan luas panen sekitar 10,66 juta hektar atau sebanyak 54,65 juta ton setiap tahun. Pulau Jawa merupakan penyumbang hasil panen tertinggi dibandingkan Pulau lainnya di Indonesia setiap tahun, akan tetapi di Pulau Sumatera sektor pertanian menjadi pendorong perekonomian terbesar yaitu 56,5%, dan juga mayoritas Provinsi-provinsi di wilayah Pulau Sumatera menggantungkan perekonomian mereka kepada sektor pertanian.

Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Hasil produksi hanya diterima petani setiap musim sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak. Menurut Mubiyarto (1973)

petani kaya dapat menyimpan hasil panen untuk kemudian dijual sedikit demi sedikit pada saat diperlukan, sedangkan petani gurem (tidak memiliki lahan dan penguasaan lahan sempit) masih sulit untuk menyimpan hasil taninya.

Menurut Suryana dkk (2001) sekitar 70% petani Indonesia diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin berpendapatan rendah. Keberadaan kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani untuk tujuan produksi, pengeluaran hidup sehari-hari sebelum hasil panen terjual. Dikarenakan hasil panen yang lama, biaya produksi yang mahal serta tidak adanya kesempatan kerja diluar musim tanam, sebagian petani tidak dapat memenuhi biaya hidupnya dari satu musim ke musim lainnya tanpa meminjam. Kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani Indonesia untuk beberapa tujuan, yaitu biaya hidup sehari-hari sebelum hasil panen terjual (Mears L.A, 1961).

Pemerintah kemudian merespon kendala yang dihadapi masyarakat di bidang permodalan dan peningkatan pendapatan usaha pada bulan November tahun 2007 dengan meluncurkan program yang dinamai dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Program KUR tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2007 yang dirilis pada tanggal 8 Juni 2007.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan modal serta mengembangkan UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Dalam pemberian KUR ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan pihak bank selaku penyalur KUR seperti penilaian kepribadian, kemampuan pengembalian, modal yang dimiliki, dan latar belakang calon penerima KUR.

Perkembangan kredit UMKM selama tiga tahun terakhir yang dikucurkan kepada masyarakat Indonesia menurut data BPS tahun 2021 semakin meningkat (dalam milyar) yaitu dimana tahun 2017 sebanyak 882.982 yang mana terbagi dalam usaha mikro sebanyak 207.682, usaha kecil sebanyak 269.162, usaha menengah sebanyak 406.138; tahun 2018 sebanyak 969.972 yang mana terbagi dalam usaha mikro sebanyak 236.868, usaha kecil sebanyak 298.065, usaha menengah sebanyak 435.039; tahun 2019 sebanyak 1.107.240 yang mana terbagi dalam usaha mikro sebanyak 283.518, usaha kecil 343.245, usaha menengah sebanyak 480.477.

Tingkat kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga yang selalu meningkat dan beragam, dengan jumlah tanggungan yang banyak serta tingkat pendidikan tanggungan keluarga (anak) yang sangat membutuhkan biaya dalam proses studi mereka dan juga sektor lapangan usaha yang mereka punya menyebabkan rumah tangga memerlukan biaya tambahan dalam memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka. Namun dengan pendapatan yang ada ternyata tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jumlah tanggungan yang banyak dan biaya pendidikan anggota rumah tangga yang tinggi tersebut. Oleh karena itu mereka mengajukan kredit disamping untuk mengembangkan usahanya.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam mengembangkan usaha, semua pelaku usaha memiliki masalah klasik yang sama, yaitu masalah permodalan. KUR menjadi salah satu alternatif terbesar dalam menanggulangi permasalahan permodalan tersebut. Selanjutnya adalah fenomena yang terjadi di masyarakat dalam memanfaatkan dana KUR yang harusnya untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki, akan tetapi

dana tersebut digunakan sebaliknya yaitu diluar untuk pengembangan usaha mereka seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anggota rumah tangganya atau bahkan untuk membeli suatu barang yang mereka inginkan diluar dari usaha mereka.

Permasalahan kredit juga dihadapi oleh masyarakat pada sektor pertanian, yaitu dalam penyediaan kredit kepada petani, adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan menawarkan kreditnya kepada petani, namun pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani masih tetap kesulitan.

Masalah yang paling sering ditemukan dalam program KUR ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah selaku pembuat kebijakan. Masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan suntikan modal namun tidak tau akan program KUR tersebut, sehingga mereka hanya memanfaatkan dana yang ada saja untuk menjalankan usaha mereka. Menurut Charles dkk (1994) kredit pemerintah dapat dijadikan solusi dalam permasalahan permodalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik pada sektor pertanian maupun pada sektor industri.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apakah lapangan usaha, pengeluaran perkapita, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerimaan KUR dengan judul penelitian **"Peluang Petani dan Rumah Tangga Miskin Terhadap Penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera"**

Alasan pulau Sumatera diambil sebagai objek penelitian karena wilayah pulau Sumatera karena peneliti ingin melihat bagaimana perilaku masyarakat di

wilayah pulau Sumatera dalam penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu mayoritas bidang usaha yang ada di pulau Sumatera rata-rata didominasi oleh sector pertanian, maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana penerimaan KUR di sector pertanian. Penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah pulau Sumatera didominasi oleh Provinsi Sumatera Barat, dan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkecil adalah pada Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh lapangan usaha dalam menentukan peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera?
2. Seberapa besar pengaruh pengeluaran anggota rumah tangga terhadap peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera?
4. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan penerima terhadap peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera?

1.4. Tujuan Penelitian

Bertolak pada judul dan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dikemukakan pada penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis pengaruh jenis lapangan usaha terhadap peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran rumah tangga terhadap peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tanggungan rumah tangga terhadap peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap peluang penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian memberikan sebagai bahan pertimbangan terutama bagi pihak yang berkepentingan (stakeholders) Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti pemerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dalam mengetahui beragam permasalahan yang dihadapi oleh penerima kredit usaha rakyat di Sumatera. Beberapa variable yang dianalisis dalam kajian ini antara lain adalah lapangan usaha, pengeluaran perkapita, jumlah tanggungan, serta tingkat pendidikan dengan penerimaan kredit usaha rakyat (KUR) di Wilayah Pulau Sumatera.

